

NO KATALOG : 4102002.6411



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2019

KABUPATEN MAHAKAM ULU



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT



**INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA (IPM)**

2019

KABUPATEN MAHAKAM ULU

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MAHAKAM ULU 2019

Nomor Publikasi : 64110.1909
Katalog BPS : 4102002.6411

Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm
Jumlah Halaman : vi + 41 Halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat

Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, dan/atau Menggunakan Sebagian atau Seluruh Isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Buku “*Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, 2019*” ini merupakan salah satu output yang dihasilkan Badan Pusat Statistik secara berkala setiap tahunnya. Publikasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat mengenai data dan informasi pembangunan manusia di Mahakam Ulu.

Publikasi ini secara umum memuat analisis pembangunan manusia dengan menggunakan data IPM, baik secara deskriptif maupun analisis lanjutan. Perhitungan IPM telah mengadopsi penghitungan metode baru yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (2) pengetahuan (*knowledge*), dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Adapun data yang digunakan untuk keperluan perhitungan IPM berupa data primer (Susenas, Sensus Penduduk) dan atau data yang diperoleh dari para pelaku ekonomi serta dari dinas/instansi yang terkait.

Kepada instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Diharapkan kerjasama ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sendawar, Oktober 2019

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUTAI BARAT
KEPALA



WIDIYANTONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	6
1.3. Sistematika Penulisan	7
BAB II METODOLOGI	8
2.1. Pengertian IPM	9
2.2. Manfaat IPM	14
2.3. Keterbatasan IPM	14
2.4. Konsep dan Metodologi Komponen Penyusunan IPM	16
2.5. Inovasi dalam Penghitungan IPM	19
BAB III ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.	27
3.1. Perkembangan IPM	28
3.2. Perkembangan Komponen IPM	31
3.2.1 Angka Harapan Hidup	31
3.2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	33
3.2.3 Rata-rata Pengeluaran Riil	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru	22
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan 2015 - 2018	37

<https://mahulukab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusun	10
Gambar 2.2	Dimensi Pembangunan Manusia.....	11
Gambar 2.3	Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP	20
Gambar 3.1	Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018..	28
Gambar 3.2	Pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018..	29
Gambar 3.3	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu dan Tahun 2014-2018	32
Gambar 3.4	Angka Harapan Sekolah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018	35
Gambar 3.5	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018	36
Gambar 3.6	Rata-rata Pengeluaran Rill Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun 2014-2018 (Ribu Rp)	40

Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Mahakam Ulu, 2019

PENDAHULUAN

1

<https://mahulukabps.go.id>



1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam konteks lebih luas, pembangunan yang dilakukan lebih dari sekedar meningkatkan kondisi ekonomi manusia. Pembangunan tersebut lebih ditekankan pada manusia sebagai obyek pembangunan, serta perluasan kesempatan dan pilihan bagi manusia.

Pembangunan manusia diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, melalui peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang seringkali menjadi tujuan pembangunan, pada kenyataannya tidak serta merta dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan dipandang sebagai salah satu alat pembangunan yaitu untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, dan bukan merupakan tujuan akhir dari suatu pembangunan.

Pembangunan manusia juga difokuskan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih. Dengan kata lain, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan memberikan kesempatan bagi individu untuk dapat menggunakan kemampuannya tersebut. Terdapat tiga pondasi bagi pembangunan manusia, yaitu: (1) memiliki umur panjang, hidup secara sehat dan kreatif; (2) memiliki pengetahuan, serta (3) memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak. Jika ketiga pondasi tersebut dapat dimiliki, maka terdapat peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Secara fundamental, pembangunan manusia juga diartikan sebagai peningkatan kesempatan untuk memilih. Pembangunan seharusnya dimaksudkan untuk menciptakan alternatif pilihan yang lebih banyak bagi manusia. Proses pembangunan manusia seharusnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, untuk dapat mengembangkan potensi maksimal mereka dan untuk memiliki kesempatan menuju kehidupan yang produktif dan kreatif.

Human Development Report pertama yang dipublikasikan pada tahun 1990 oleh United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa:”*Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.*”...

Kutipan tersebut secara jelas menekankan pesan utama agar pembangunan dilakukan dengan berpusat pada manusia, yaitu dengan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model ‘pertumbuhan ekonomi’ lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas manusia. Lebih lanjut, ukuran kinerja ekonomi yang digunakan, seperti PDRB per kapita, dirasakan masih belum cukup untuk digunakan sebagai proxy bagi ukuran keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, digunakan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara lebih luas telah dapat mengukur hasil capaian pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan dan kemampuan. Kedua penggunaan kapabilitas yang mereka miliki seperti untuk menggunakan waktu luangnya, baik untuk tujuan produktif ataupun aktivitas lainnya, seperti sosial, budaya dan politik. Jika kedua sisi tersebut tidak seimbang, maka kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Agar konsep pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan kedalam penyusunan kebijakan, maka pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Selama bertahun-tahun, UNDP telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik untuk menilai capaian kinerja pembangunan manusia. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kesulitan dalam penyederhanaan konsep holistik pembangunan manusia menjadi satu angka. Oleh karenanya, penting untuk disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya. Sangatlah tidak mungkin untuk menghasilkan ukuran yang komprehensif atau bahkan suatu kumpulan indikator yang komprehensif, karena banyak dimensi penting dari pembangunan manusia yang tidak terukur.

Dalam konteks Mahakam Ulu, pembangunan manusia tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun visi Pemerintah Mahakam Ulu adalah ***“Membangun Mahakam Ulu Untuk Semua, Sejahtera Berkeadilan”***. Dalam misinya, pembangunan manusia tertuang dalam beberapa poin, salah satunya sejahtera. Yang diartikan bahwa di masa yang akan datang dapat tercipta kualitas hidup masyarakat Mahakam Ulu yang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan,

kehatan dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

Selanjutnya, terdapat pada poin peningkatan kualitas SDM dan taraf hidup masyarakat, yaitu dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah berbasis kerakyatan dan terbuka lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Penjabaran visi dan misi tersebut tertuang dalam berbagai program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Program pembangunan yang baik didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, dalam perencanaannya program dapat dibuat secara sistematis dan komprehensif dengan didasarkan pada data yang akurat. Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Kebijaksanaan dan strategi yang telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data statistik tersebut sangat diperlukan.

Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*). Daerah dengan IPM masih rendah akan mendapatkan DAU yang lebih besar daripada daerah dengan IPM tinggi. Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogyanya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan penyusunan Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 adalah untuk memperoleh gambaran kondisi mengenai capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mahakam Ulu, yang mencakup variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Secara rinci, tujuan Publikasi ini adalah:

- 1) Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Mahakam Ulu yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan.
- 2) Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Menyediakan pembahasan mengenai keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi lain pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan anggaran, terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Penyusunan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang serta maksud dan tujuan disusunnya Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Mahakam Ulu Tahun 2019
- 2) Bab II memuat pengertian Indeks Pembangunan Manusia, sumber data IPM serta konsep dan definisi yang dianggap penting. Berdasarkan uraian Bab II ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia serta komponen-komponen yang mendukung penyusunan Indeks Pembangunan Manusia.
- 3) Bab III berisi trend Analisis Indeks Pembangunan Manusia serta komponen-komponen penyusunnya.

Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Mahakam Ulu, 2019

METODOLOGI

2



<https://mahulu.bps.go.id>

2.1 Pengertian IPM

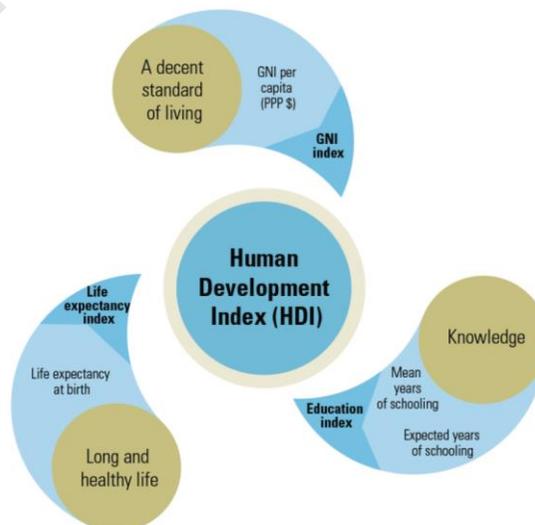
Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan perluasan pemahaman dari kesejahteraan hidup manusia secara lebih luas, tidak hanya sekedar kesejahteraan secara ekonomi saja. Pendekatan pembangunan tersebut berpusat pada manusia dan perluasan kesempatan serta pilihan dalam hidup manusia.

Pembangunan manusia lebih difokuskan kepada peningkatan hidup manusia sebagai yang utama, dan bukan sekedar pencapaian pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi tetap diciptakan namun bukan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai, namun lebih kepada sebagai sarana untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Selain itu, pembangunan manusia juga diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut dimungkinkan jika SDM dibangun kemampuan dan kapasitasnya, serta diberikan kesempatan untuk mempergunakan kemampuan dan kapasitasnya tersebut, sehingga diharapkan kesempatan lain akan lebih terbuka untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari berbagai aspek kehidupan manusia.

Sejak pengukuran tersebut diperkenalkan, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap ketiga hal tersebut merupakan representasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan pilihan, baik itu pada aspek ekonomi maupun sosial, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat 3 (tiga) komponen penyusun IPM, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi (Gambar 2.1). Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek pendidikan diukur oleh indeks pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

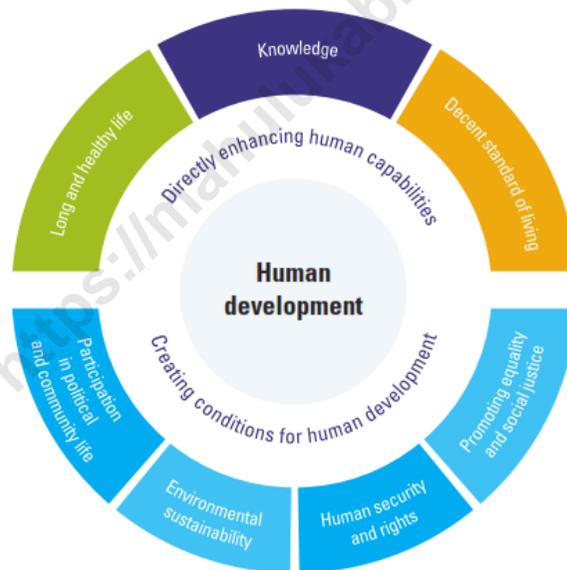
Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusun



Sumber: *Human Development Report, UNDP, 2015*

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan dilakukannya pembangunan manusia. Aspek tersebut diantaranya adalah keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan agenda pembangunan baru pasca tahun 2015, pembangunan manusia masih dianggap relevan untuk mengartikulasikan tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan manusia dengan menciptakan kondisi lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan dan stabil (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Dimensi Pembangunan Manusia



Sumber: Human Development Report, UNDP, 2015

Dalam HDR pertama di tahun 1990, disebutkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya melibatkan pembentukan kapabilitas seorang manusia, namun juga termasuk bagaimana manusia tersebut dapat menggunakan kapabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia merupakan partisipan yang aktif dalam memaksimalkan pilihan hidupnya berdasarkan kapabilitas yang dimilikinya. Sebagai partisipan yang aktif, maka manusia dapat berperan

dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Peran aktif tersebut dapat ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam memberikan masukan bagi pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan mengindikasikan kapabilitas seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam menciptakan pembangunan. Selain itu, partisipasi dalam kehidupan politik dan komunitas juga berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan kapabilitas seseorang ketika memberikan masukan untuk memberikan pengaruh atas pengambilan keputusan diberbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya dan sosial. Berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan misalnya adalah penyampaian aspirasi kepada lembaga perwakilan, buruh yang bergabung dalam serikat buruh untuk turut serta menciptakan kondisi bekerja yang lebih baik, pergerakan sosial untuk melawan kemiskinan dan lain-lain. Berbagai bentuk partisipasi tersebut mengandung nilai intrinsik bahwa keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan manusia adalah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam kaitannya dengan lingkungan, studi empiris yang dilakukan oleh Maccari dengan menggunakan data 129 negara menunjukkan terdapat keterkaitan antara keberlanjutan lingkungan dan pembangunan manusia dalam bentuk kurva U. Model menunjukkan bahwa hingga pada level IPM tertentu terdapat kecenderungan korelasi negatif, dimana kualitas lingkungan cenderung menurun seiring dengan penambahan nilai IPM. Sebaliknya, setelah titik minimum dari kualitas lingkungan, terdapat kecenderungan bahwa negara-negara dengan tingkat IPM yang lebih tinggi akan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik. Tren positif tersebut mengindikasikan keberhasilan capaian kebijakan lingkungan yang sejalan dengan pembangunan negara tersebut. Oleh karena itu, dalam membangun SDM diperlukan pengetahuan awal mengenai capaian pembangunan manusia di suatu wilayah.

Informasi tersebut dapat digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang menyeluruh, tidak saja aspek pembangunan manusianya namun juga dengan sambil memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam publikasi HDR 1994, disebutkan bahwa pembangunan manusia berkaitan erat dengan rasa aman individu, namun tidaklah identik. Terdapat tujuh dimensi penting dari keamanan, yaitu (1) ekonomi, (2) kesehatan, (3) urusan pribadi, (4) politik, (5) makanan, (6) lingkungan, dan (7) masyarakat. Konsep pembangunan manusia lebih ditekankan pada perluasan pilihan dan kebebasan bagi manusia. Sementara itu, rasa aman pada manusia ditekankan pada pemberian jaminan atas kebebasan tersebut sehingga masyarakat dapat menjalankan pilihan tersebut dengan rasa aman dan memiliki rasa percaya bahwa kesempatan untuk memilih tidak akan terganggu atau hilang. Adanya rasa aman pada manusia, dengan cara menghilangkan atau meniadakan berbagai ancaman, akan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi individu untuk berkembang dalam proses pembangunan manusia.

Kondisi yang juga diperlukan dalam menjamin capaian pembangunan manusia adalah adanya kesetaraan dalam masyarakat. Niskanke dan Thorbecke (2006) menyatakan bahwa keberadaan disparitas dalam masyarakat dapat menciptakan *rent-seeking*, situasi sosial politik yang tidak stabil, alokasi pendapatan yang kecil bagi kelas menengah ekonomi, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya investasi dan menekan pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai suatu media yang dapat menciptakan proses pembangunan manusia. Oleh karena itu, selain juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan manusia, perlu juga diperhatikan apakah berbagai kondisi yang diperlukan agar tercipta pembangunan manusia telah tersedia di suatu wilayah.

2.2 Manfaat IPM

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (2) pengetahuan (*knowledge*), dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik (Regional) Bruto (PDB/PDRB) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Selain itu, IPM juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Data IPM dapat digunakan sebagai dasar pemeringkatan atau penentuan level capaian pembangunan suatu wilayah/Negara. Lebih lanjut, IPM termasuk data strategis di Indonesia karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3 Keterbatasan IPM

Seperti indeks komposit lainnya, terdapat beberapa keterbatasan IPM. Keterbatasan tersebut perlu dipahami untuk menghindari kesalahan pada penggunaan indeks tersebut. Lebih lanjut, dengan memahami keterbatasan

tersebut, diharapkan menjadi bahan masukan untuk pengembangan ketersediaan dan reliabilitas data, khususnya data yang terkait dengan indikator ketiga dimensi pembangunan manusia. Adapun beberapa keterbatasan IPM tersebut adalah:

- 1) Indeks tersebut bukan merupakan suatu ukuran yang komprehensif mengenai pembangunan manusia. Indeks tersebut hanya mencakup tiga aspek dari pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi, tidak termasuk aspek penghargaan diri, kebebasan politik, dan masalah lingkungan.
- 2) Indeks tersebut tidak dapat menilai perkembangan pembangunan manusia dalam jangka pendek, karena komponen angka harapan hidup, tidak responsif terhadap perubahan kebijakan dalam jangka pendek.
- 3) IPM memasukkan variasi pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Ini berarti bahwa IPM yang sama dari dua wilayah tidak mengindikasikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki pembangunan manusia yang identik. Dengan kata lain, mungkin terdapat perbedaan bagaimana pembangunan manusia didistribusikan antar sub wilayah atau antar kelompok sosial.

Dalam perjalanannya, IPM terus diteliti dan mengalami penyempurnaan. Oleh karena itu, indeks tersebut diterima secara luas sebagai indikator yang baik dalam melihat tingkat pembangunan manusia. Beberapa alasan mengapa IPM merupakan indikator yang cukup baik sebagai ukuran pembangunan manusia, adalah:

1. IPM menterjemahkan secara sederhana konsep yang cukup kompleks kedalam tiga dimensi dasar yang terukur.
2. IPM membantu dalam pergeseran paradigma pembangunan dari

pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi menjadi berfokus pada manusia.

3. IPM berfokus pada kapabilitas yang relevan, baik untuk negara maju dan berkembang, sehingga menjadikan indeks tersebut sebagai alat yang universal.
4. IPM menstimulasi diskusi mengenai pembangunan manusia.
5. IPM memberikan motivasi bagi pemerintah untuk berkompetisi secara sehat dengan negara/wilayah lain melalui keterbandingan angka IPM.

2.4 Konsep dan Metodologi Komponen Penyusun IPM

Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam menganalisis kondisi pembangunan manusia di Kutai Barat. Adapun konsep dan definisi dari variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan

kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir; indeks pendidikan diukur dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan indeks pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Perumusan matematis penghitungan masing-masing indeks sebagai berikut.

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Keterangan:

$I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks Kesehatan,

$I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks Pendidikan,

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran,

AHH = Angka Harapan Hidup,

HLS = Harapan Lama Sekolah,

RLS = Rata-rata Lama Sekolah.

Adapun penentuan nilai minimum dan maksimum sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua.

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: kategori rendah untuk IPM kurang dari 60, kategori sedang atau menengah untuk nilai IPM antara 60 sampai dengan di bawah 70, tinggi untuk nilai IPM antara 70 sampai dengan di bawah 80 dan sangat tinggi untuk IPM 80 ke atas.



Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

2.5 Inovasi Dalam Penghitungan IPM

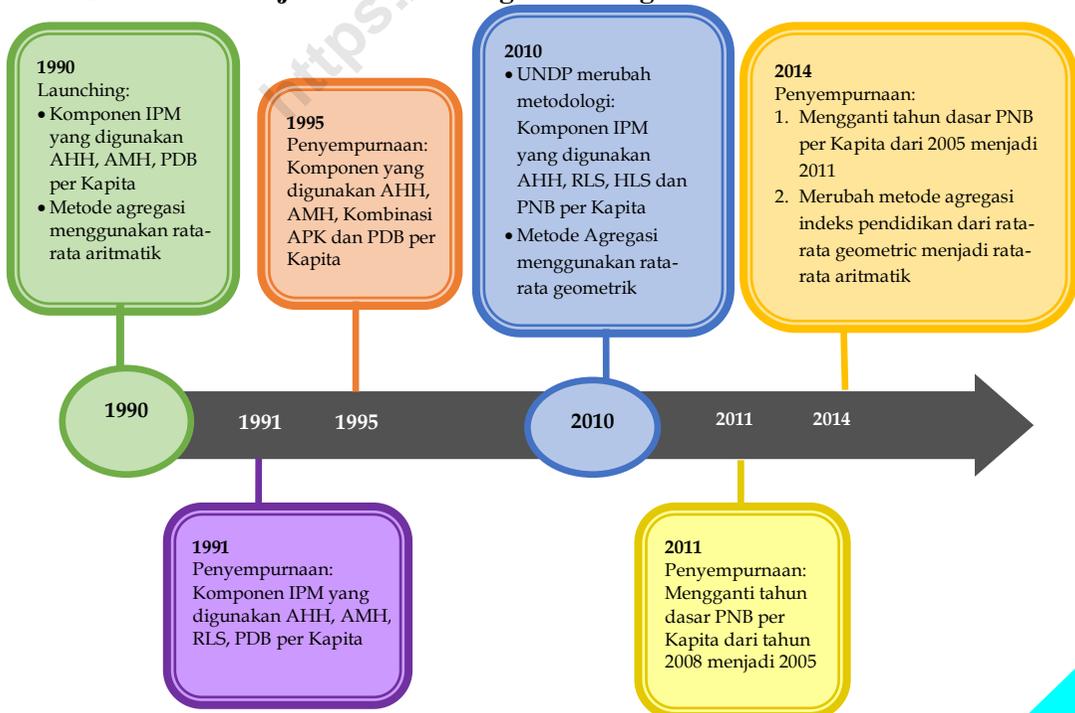
Indikator IPM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan sejak pertama kali diperkenalkan, yaitu di tahun 1991, 1995 dan 2010. Saat pertama kali diperkenalkan, IPM dihitung melalui pendekatan tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang diperkirakan dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan menggunakan indikator angka melek huruf dewasa. Dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diperkirakan dengan PDB (PDRB) per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Pada tahun 1991, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Sehingga, pengukuran dimensi pengetahuan masyarakat dilakukan dengan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Masing-masing indikator tersebut diberikan bobot/penimbang. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sedangkan indikator

rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM dengan cukup signifikan. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar Gabungan (*Combined Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Gambar 2.3 Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP



Catatan :

AHH: Angka Harapan Hidup Saat Lahir

AMH: Angka Melek Huruf

RLS: Rata-rata Lama Sekolah

PDB: Produk Domestik Bruto

APK: Angka Partisipasi Kasar

HLS: Harapan Lama Sekolah

PNB: Produk Nasional Bruto

Penyempurnaan dilakukan kembali pada tahun 2011. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Kemudian pada tahun 2014, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat diperoleh suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Penyempurnaan penghitungan IPM dilakukan, karena indikator pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH) dinilai sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak mampu menggambarkan kualitas pendidikan. Nilai AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif untuk membedakan kondisi antar wilayah akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya, indikator PDB/PDRB per kapita yang merupakan *proxy* pendapatan masyarakat tidak cukup representatif dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah. Besaran PDB/PDRB diciptakan dari seluruh faktor produksi, termasuk faktor produksi dari luar. Sehingga, jika besaran balas jasa faktor produksi yang berasal dari luar wilayah tersebut cukup besar, maka PDB/PDRB per kapita tidak dapat menangkap pendapatan yang dinikmati oleh penduduk lokal suatu wilayah. Sehingga indikator tersebut tidak cukup representatif dalam menggambarkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah.

Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan antar dimensi pembangunan. Oleh karena itu, dalam menghitung indeks komposit IPM, maka digunakan rata-rata geometrik. Hal ini disebabkan karena rata-rata geometrik cukup sensitif dalam menangkap adanya ketimpangan antar dimensi pembangunan manusia di suatu wilayah. Rata-rata aritmatik, jika digunakan, menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Tabel 2.1 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Adanya perubahan dalam sistem penghitungan IPM membawa dampak langsung, baik terhadap besaran nilai IPM maupun terhadap peringkat IPM suatu wilayah. Secara umum, besaran nilai IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf

(AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Perbedaan metode penghitungan juga berdampak terhadap peringkat IPM. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada indeks dimensi, yang pada akhirnya mempengaruhi agregasi indeks secara signifikan. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode penghitungan tersebut tidak sama.

Indonesia juga telah mengadopsi penghitungan metode baru IPM. Dengan mempertimbangkan kelemahan pada penghitungan metode lama, maka implementasi metode penghitungan yang baru dirasakan perlu, sehingga nantinya nilai IPM Indonesia dapat diperbandingkan dengan nilai IPM Negara lain sebagai cara untuk mengukur capaian pembangunan manusia. Sejak tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini didekati dengan pengeluaran per kapita.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan,

ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Penambahan jumlah komoditas dilakukan, selama kurun waktu 1990 hingga 2014 terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pada jumlah komoditas untuk melakukan penghitungan paritas daya beli masyarakat.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

ANALISIS IPM

3



Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula pencapaian pembangunan manusianya. Namun, angka IPM kurang memiliki makna apabila tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau wilayah lainnya. Karena melalui analisis IPM dapat diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah Indonesia. Dengan kata lain, angka IPM tersebut dapat digunakan sebagai suatu ukuran yang dapat membandingkan posisi relatif pembangunan manusia antar kabupaten/kota khususnya Kabupaten Mahakam Ulu untuk wilayah Kalimantan Timur.

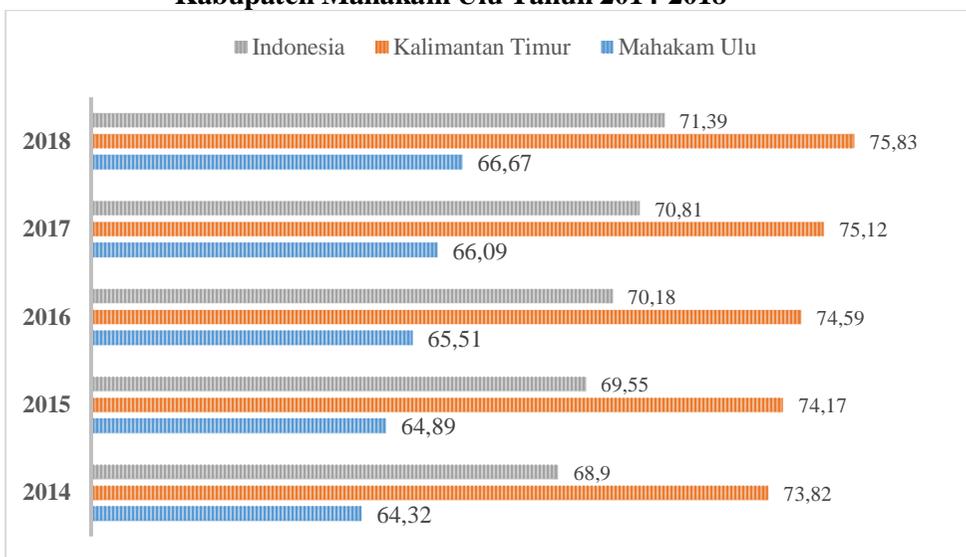
Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan Wilayah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang menggunakan data IPM.

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan IPM Kabupaten Mahakam Ulu berikut komponennya.

3.1 Perkembangan IPM

Pencapaian pembangunan manusia di Indonesia dan Kalimantan Timur selama periode 2015-2018 secara umum mengalami peningkatan, tak terkecuali dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Walaupun IPM Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 hanya menduduki peringkat ke-10 untuk wilayah Kalimantan Timur, namun capaian pembangunan manusia Mahakam Ulu semakin meningkat tiap tahun. Selama lima tahun terakhir, IPM Mahakam Ulu mengalami peningkatan dari 64,32 pada tahun 2014 menjadi 66,67 pada tahun 2018. Perkembangan IPM ini menunjukkan adanya peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Capaian IPM Mahakam Ulu tahun 2018 termasuk dalam klasifikasi IPM “sedang” menurut standar UNDP dan masih lebih rendah dari capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur yaitu sebesar 75,83. Perkembangan capaian pembangunan manusia Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.1.

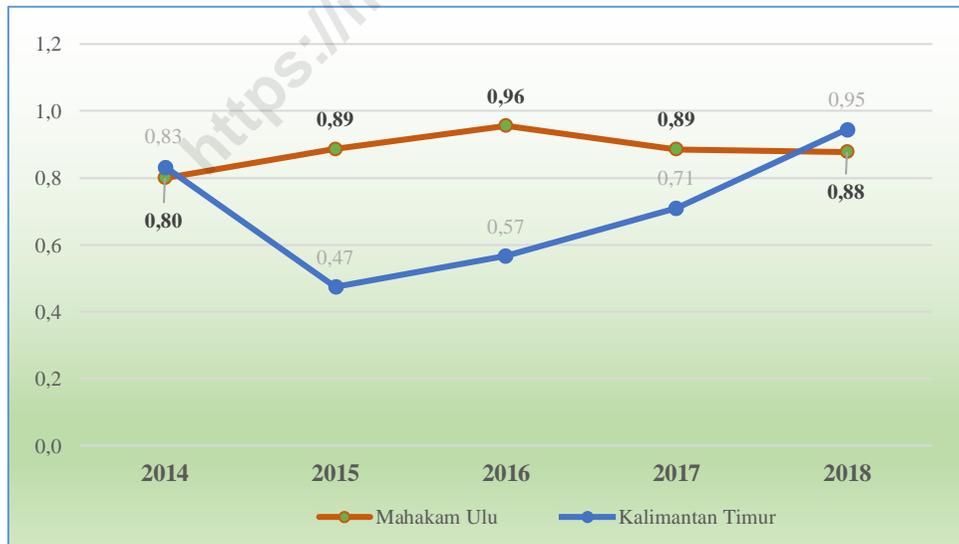
Gambar 3.1 Perbandingan IPM Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018



Selama periode 2014-2018 pola perkembangan IPM Mahakam Ulu menunjukkan adanya pengurangan jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang dipresentasikan pembangunan manusianya semakin baik. Hal ini memberi indikasi bahwa meski kualitas penduduk semakin membaik, namun kecepatan pertumbuhan IPM relatif melambat. Pertumbuhan IPM pada dasarnya akan semakin melambat pada saat nilai IPM semakin tinggi.

Untuk melihat tingkat kelajuan peningkatan IPM dalam suatu periode pada wilayah tertentu dapat dilihat dari angka pertumbuhan IPM yang dihasilkan pada Gambar 3.1. Angka ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai nilai maksimalnya.

Gambar 3.2 Pertumbuhan IPM Kabupaten Mahakam Ulu dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



Pertumbuhan IPM Mahakam Ulu dari tahun 2014 - 2018 rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen. Dimana pertumbuhan IPM paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,96 persen dan paling rendah terjadi pada tahun

2014 yaitu sebesar 0,80 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Timur, IPM Mahakam Ulu mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu pada periode tahun 2015 – 2017. Namun pada tahun 2018 pertumbuhan IPM Mahakam Ulu kembali berada di bawah IPM Kalimantan Timur yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,95 persen.

Selama periode 2014-2018 IPM Mahakam Ulu terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan kinerja pemerintah yang terus membaik dari waktu ke waktu, khususnya pasca pemekaran dari induknya (Kabupaten Kutai Barat). Keseriusan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengupayakan segala bentuk kemudahan bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses sarana pendidikan dan kesehatan yang mendasar terus ditingkatkan. Upaya tersebut antara lain ditempuh baik melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana pendidikan dan adanya bantuan dana berupa dana BOS/BOSDA yang membebaskan siswa dari biaya sekolah. Disamping itu untuk bidang kesehatan juga diluncurkan dana bantuan yang membebaskan masyarakat miskin khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Dalam prakteknya, peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini berbeda dengan komponen daya beli yang dapat bertambah secara nyata seiring dengan keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

3.2 Perkembangan Komponen IPM

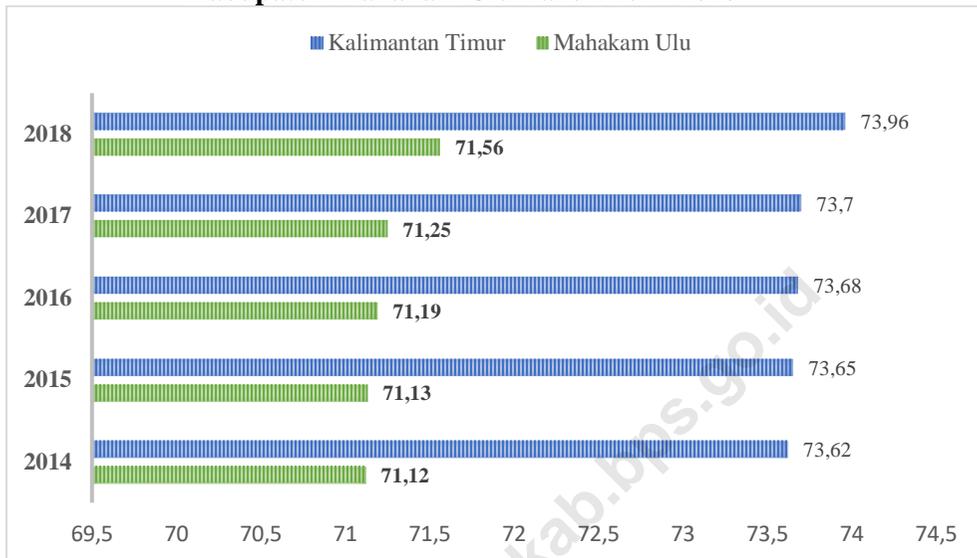
Perkembangan IPM dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah

(RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran Per Kapita. Perkembangan IPM yang meliputi peningkatan dan kontribusi setiap komponen terhadap IPM secara terpisah akan dibahas pada subbab berikut.

3.2.1 Angka Harapan Hidup

Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). AHH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan secara khususnya. Perkembangan AHH selama kurun waktu 5 tahun terakhir, periode 2014-2018, menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 nilai AHH Mahakam Ulu sebesar 71,12 tahun meningkat menjadi 71,13 tahun pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 bertambah lagi 0,06 tahun menjadi 71,19 tahun dan pada tahun 2017 naik menjadi 71,25. Lalu pada tahun 2018 mencapai 71,56 tahun, angka ini bertambah 0,44 tahun selama lima tahun terakhir. Namun demikian, capaian nilai AHH Mahakam Ulu masih lebih rendah dari nilai AHH Kalimantan Timur yaitu sebesar 73,96.

Gambar 3.3 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018



Peningkatan AHH sangat berkaitan erat dengan angka kematian bayi, semakin tinggi kematian bayi nilai AHH akan menurun. Faktor yang mempengaruhi kematian bayi sangat tergantung dari derajat kesehatan masyarakat. Indikator derajat kesehatan masyarakat antara lain akses terhadap pelayanan kesehatan, status sosial ekonomi masyarakat serta sanitasi kesehatan di lingkungan tempat tinggal. Berikut gambaran tentang indikator derajat kesehatan di Mahakam Ulu.

a. Jumlah Tenaga Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Balita

Indikator ini menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter untuk melayani masyarakat. Perkembangan tenaga dokter di Kabupaten Mahakam Ulu mengalami penambahan setiap tahunnya mulai dari 19 orang pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 23 orang. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penambahan menjadi 26 tenaga

dokter yang terdiri dari 19 Dokter Umum, 4 Dokter Gigi dan 3 Dokter Spesialis.

Untuk ketersediaan fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dan dokter puskesmas yang menyentuh langsung dengan sebagian besar masyarakat di Mahakam Ulu, setiap tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 31 puskesmas/ puskesmas pembantu lalu bertambah pada tahun 2017 menjadi 34 puskesmas/ puskesmas pembantu lalu mengalami peningkatan menjadi 43 puskesmas/ puskesmas pembantu pada tahun 2018.

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sangat berkaitan dengan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Lebih khusus bagi balita, pelayanan kesehatan yang baik sangat berarti dalam peningkatan derajat kesehatan, karena balita amat rentan terhadap berbagai macam penyakit.

Disamping ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, status gizi balita juga mempengaruhi angka harapan hidup. Penentu utama status gizi adalah makanan yang dikonsumsi, di samping peranan tenaga medis dan ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai faktor penunjang. Semakin sesuai dengan standar kesehatan dan berkualitas makanan yang dikonsumsi seseorang, tentu status gizinya akan semakin baik.

3.2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

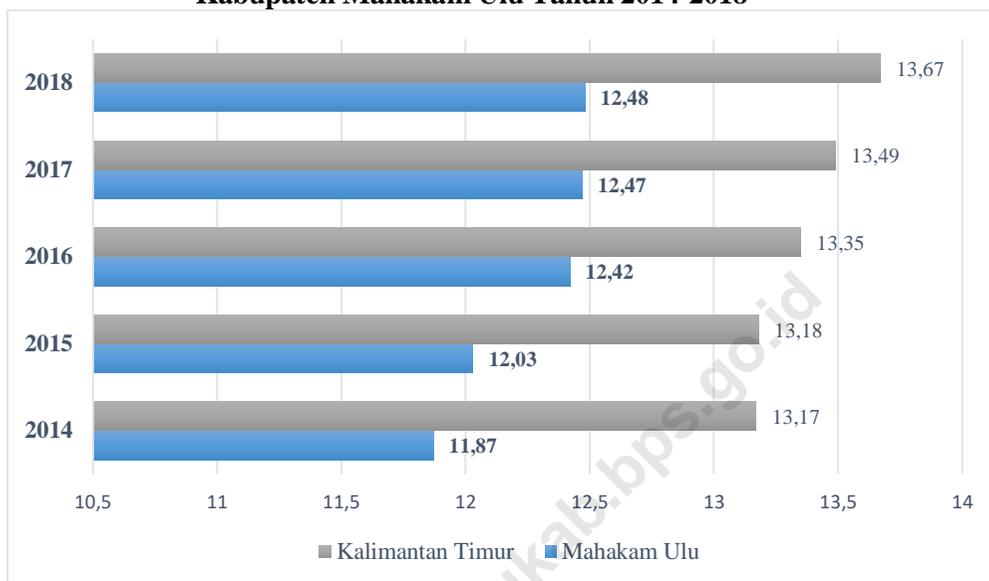
Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Berbekal pendidikan yang cukup, setiap individu dituntut dengan kemampuannya sendiri dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup secara lebih layak. Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi

pengetahuan dalam IPM adalah angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia.

Angka harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah selama periode 2014-2018 menunjukkan trend peningkatan, meskipun nilainya masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, angka harapan lama sekolah di Mahalam Ulu mencapai 12,48 tahun lebih tinggi 0,01 tahun dari tahun 2017 yang sebesar 12,42 tahun. Sedangkan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur berada pada 13,67 tahun pada tahun 2018. Sama halnya dengan perkembangan angka harapan sekolah, jika diamati rata-rata pertumbuhan angka harapan lama sekolah selama periode 2014-2018, rata-rata pertumbuhan angka harapan lama sekolah di Mahakam Ulu sebesar 1,09 persen, lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 1,24 persen.

Gambar 3.4 Angka Harapan Sekolah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014-2018

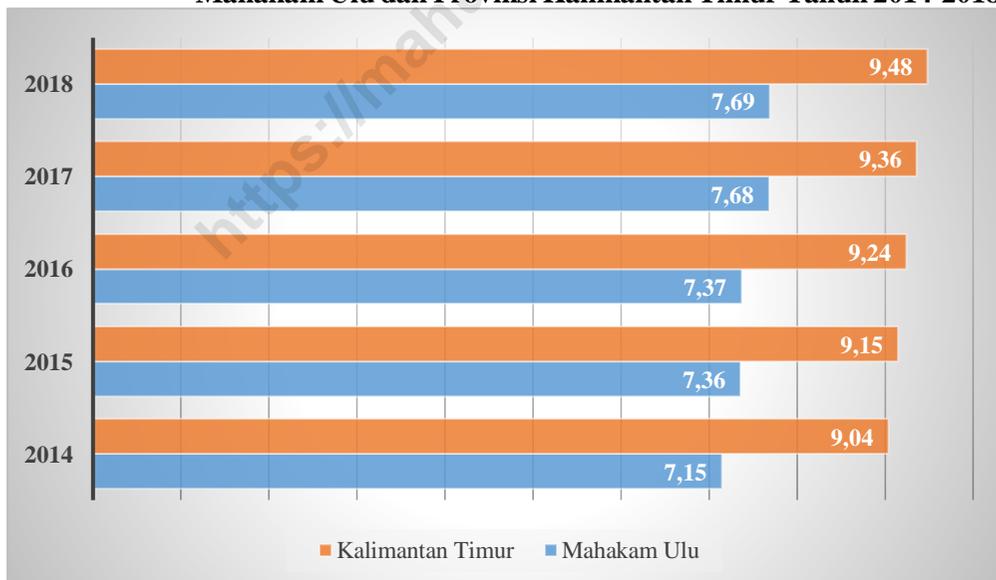


Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2018 sebesar 12,48 tahun. Hal tersebut berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 sampai 13 tahun atau setara dengan Diploma 1.

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 2014-2018, rata-rata lama sekolah penduduk 15 Tahun ke atas di Mahakam Ulu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 7,15 tahun hingga tahun 2018 angka ini berada pada 7,69 tahun, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 2,32 persen, lebih besar dibanding pertumbuhan rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 1,33 untuk periode 2014 – 2018.

Angka RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Angka RLS Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2018 sebesar 7,69 tahun yang berarti secara rata-rata, jumlah tahun belajar penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yang berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal adalah 7 sampai 8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka tersebut masih lebih kecil daripada angka Harapan Lama Sekolah yang memiliki selisih sekitar 5 tahun.

Gambar 3.5 Rata-rata Lama Sekolah (*Mixed Years Schooling*) Kabupaten Mahakam Ulu dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018



Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa komponen, salah satunya adalah angka partisipasi sekolah. Semakin tinggi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka akan berdampak pada semakin tingginya pendidikan yang ditamatkan penduduk pada suatu daerah. Sehingga untuk memonitor kemajuan proses dan *output* dari pendidikan dapat dilihat melalui angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan suatu indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah berpartisipasi dalam dunia pendidikan melalui jumlah penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu.

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk 7-18 tahun di Kabupaten Mahakam Ulu, mulai dari SD sampai SMA bergerak fluktuatif. Pola umum yang terjadi di Indonesia, bahwa makin tinggi jenjang sekolah makin rendah angka partisipasi sekolah. Pola penurunan angka partisipasi sekolah pada jenjang yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa telah terjadi angka putus sekolah pada usia sekolah. Pada usia sekolah tingkat SMA 16-18 tahun pencapaiannya hanya sekitar 75,26 persen di tahun 2018, menunjukkan bahwa sekitar 24,74 persen telah putus sekolah. Hal ini bisa terjadi, karena sebagian dari yang putus sekolah tersebut telah masuk ke dunia kerja, membantu keluarga dalam bertani atau berladang.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Mahakam Ulu Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan 2015 - 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
7 - 12	99,70	100,00	100,00	99,12
13 - 15	94,78	100,00	99,20	100,00
16 - 18	93,14	81,71	75,40	75,26
Angka Partisipasi Murni (APM)				
SD	94,02	100,00	100,00	99,12
SLTP	61,86	88,12	85,43	89,70
SMA	77,39	52,21	54,84	52,08

Perkembangan angka partisipasi sekolah mulai usia SD (7-12) tahun sampai usia SMA (16-18) pada periode tahun 2015-2017 mengalami trend yang fluktuatif, APS usia SD di Mahakam Ulu meningkat dari 99,70 persen menjadi 100,00 persen pada tahun 2017 namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 99,12 persen. Sama halnya APS usia SMP dalam periode yang sama mencapai 94,78 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2018. Sementara APS anak usia SMA mengalami penurunan dari 93,14 persen pada tahun 2015 menjadi 75,26 persen pada tahun 2018.

Tabel 3.1 juga menunjukkan angka APM di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015 – 2018 yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, sehingga APM SD > SLTP > SMA. APM untuk tingkat SD mencapai angka 99,12 pada tahun 2018, angka ini menggambarkan banyaknya penduduk yang berusia 7-12 tahun yang sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SD. Sedangkan sisanya kemungkinan belum bersekolah pada tingkat SD atau sudah bersekolah pada tingkat SLTP atau sudah putus sekolah.

Selanjutnya APM pada jenjang SLTP tercatat sebesar 89,70 pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 85,43. Untuk APM pada jenjang SMA di Kabupaten Mahakam Ulu hanya sebesar 52,08 persen pada tahun 2018. Angka ini banyak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan APM pada tahun 2015 yang sebesar 77,39 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyak penduduk usia 16-18 tahun tidak melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA sederajat kemungkinan karena sebagian siswa melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Mahakam Ulu.

3.2.3 Rata-rata Pengeluaran Riil

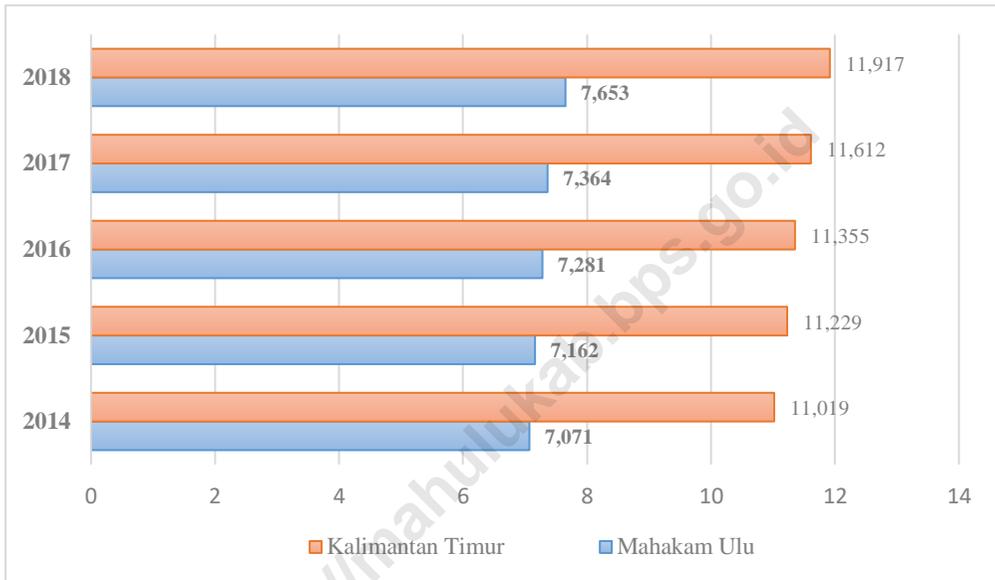
Selain dimensi kesehatan dan pendidikan, terdapat dimensi ekonomi yang termasuk juga kedalam komponen pembentuk IPM. Dimensi ekonomi diukur oleh indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu negara, maka semakin tinggi pula daya beli penduduk negara tersebut.

Tingkat daya beli masyarakat yang tinggi merepresentasikan kemampuan masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Hal ini berarti bahwa kondisi daya beli masyarakat yang tinggi menyediakan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tersedianya pilihan yang lebih luas bagi masyarakat merupakan gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, walaupun tidak bersifat mutlak hubungan antara peningkatan rata-rata riil masyarakat dengan peningkatan pembangunan manusia, namun adanya perkembangan positif pada dimensi ekonomi memperbesar peluang adanya peningkatan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Gambar 3.5 Menunjukkan perkembangan rata-rata pengeluaran riil Kabupaten Mahakam Ulu dan Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2014 – 2018. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan antar waktu dari nilai rata-rata pengeluaran riil masyarakat di Mahakam Ulu dan Provinsi. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mahakam Ulu. Jika dilakukan perbandingan antar wilayah, Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki nilai rata-rata

pengeluaran yang paling tinggi dibandingkan wilayah kabupaten Mahakam Ulu sepanjang periode tersebut.

Gambar 3.6 Rata-rata Pengeluaran Rill Kabupaten Mahakam Ulu dan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2018 (Ribu Rp)





Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten the Nation* —



bpskutaibarat



BPS Kab Kutai Barat



BPS Kubar



bpskutaibarat



www.kubarkab.bps.go.id